

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia merupakan sebuah proses dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Tetapi dalam perjalanannya dihadapkan oleh sejumlah tantangan yang bermacam-macam. Bagi Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi dengan kondisi geografis dan potensi sumber daya yang berbeda-beda, tidaklah mudah untuk melaksanakan pembangunan. Berbagai upaya untuk mengatasi persoalan pembangunan harus terus dilakukan. Pemerintah beserta jajarannya harus berupaya menyusun kebijakan nasional untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.²

Diawali dengan membangun wilayah pinggiran dengan metode menguatkan daerah-daerah serta desa merupakan salah satu kebijakan pembangunan strategis yang dilakukan oleh pemerintah, di mana pemerintah akan memberikan perhatian besar terhadap desa. Sebagai bagian dari Negeri Kesatuan Republik Indonesia desa adalah daerah terendah. Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan motivasi baru untuk desa untuk dapat menempatkannya sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan desa secara nasional dengan semangat “desa membangun” dengan mengutamakan

² Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hal. 1.

kekuatan desa dalam menggali kemampuan kearifan lokal serta semangat gotong royong masyarakat desa.³

Desa merupakan pencipta kemandirian bangsa dengan kemandirian ekonominya. Kemandirian desa, khususnya dalam bidang ekonomi perlu untuk dikembangkan. Setiap desa pasti mempunyai potensi. Untuk itu potensi desa berbasis ekonomi perlu untuk digali dan dikaji untuk mengetahui potensi yang di miliki oleh desa-desa yang ada di Indonesia agar terwujudnya kemandirian rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki tanpa bergantung pada campur tangan asing.⁴

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sesuai dengan Permendes, No. 4 Tahun 2015, Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa disingkat BUMDes dengan modal yang berasal dari seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat desa.⁵

Di Jawa Timur sendiri, pembangunan BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian lokal yang sudah ada lalu dikembangkan sejak di sahkannya peraturan mengenai BUMDes. Hampir di setiap Kabupaten di

³ Abdul Rahman Suleman dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 2.

⁴ J. Thomas Linbald, *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 226.

⁵ Shanti Veronica br Siahaan, dan Benedhikta Kikky Vuspitasari, *Anaisa Pemilihan Pengurus dan Unit Usaha BUMDES Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung kabupaten Bangkayang Kalimantan Barat* (Samarinda: SNSEBATIK, 2020), hal. 1.

wilayah Jawa Timur mempunyai *pilot project* BUMDes. Pendirian BUMDes sendiri disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh setiap desa. Mislanya seperti pengembangan objek wisata desa, pengelolaan pasar desa, kegiatan simpan pinjam dan pengembangan UMKM. Maka dari itu, upaya dalam mewujudkan konsep pendirian BUMDes, dirintis dengan jalan dan dikelola oleh desa.⁶

Pada tahun 2019 perekonomian di Jawa Timur tumbuh 5,54%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,58%, diikuti jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pengeluaran konsumsi Rumah tangga 4,81%.⁷ Salah satu upaya pemerintah Jawa Timur yaitu dengan memaksimalkan dana desa untuk program desa seperti halnya mendirikan BUMDes di tiap-tiap desa yang diyakini bisa menambah perekonomian menjadi lebih maju dan bisa mengurangi ketimpangan ekonomi.⁸

Namun BUMDes yang dirancang sebagai ujung tombak dalam pembangunan ekonomi desa masih banyak yang mati sebelum berperang, sehingga keberadaan BUMDes masih belum berjalan efektif dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan pembangunan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ratna, bahwa keberadaan BUMDes di desa

⁶ Robiatul Adwiyah, "*Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis Aspek Modal Sosial*", Tidak diterbitkan.

⁷ Badan Pusat Statistik, Februari 2020

⁸ Robiatul Adwiyah, "*Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis Aspek Modal Sosial*", Tidak diterbitkan.

Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro justru mengalami situasi sulit dan banyak yang dalam perjalanannya tidak membuahkan hasil. Berbagai kendala telah diteliti dan menemukan banyak variabel penyebab yang menjadikan BUMDes tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Coristya menyatakan bahwa Keberadaan BUMDes di Desa Landungsari Pembentukan BUMDes sudah sesuai dengan peraturan desa yang ada, modal awal yang dimiliki BUMDes berasal dari pemerintah desa yang memberikan pinjaman modal dengan kata lain mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana ke BUMDes sudah jelas, Unit usahanya juga banyak, tetapi mengenai modalnya masih terkendala, selain itu kontribusi BUMDes ke penguatan ekonomi desa dapat dikatakan belum memenuhi dan belum meningkatkan pendapatan desa, tetapi sebagian warga ada yang merasa terbantu karena adanya kios pasar dan pinjaman modal, BUMDes belum berperan penuh sebagai Lembaga yang bergerak di bidang ekonomi.¹⁰

Terlepas dari permasalahan di atas, terdapat salah satu daerah yang ada di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, yaitu Desa Tunggulsari. Desa Tunggulsari mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan perekonomian desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten

⁹ Ratna Aziz Prasetyo, "Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Dialektika*, Vol. 9, No. 1, 2016, hal. 98.

¹⁰ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, "KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI PENGUAT EKONOMI DESA". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No. 6. Hal 1073.

Tulungagung. Pemerintah Desa Tunggulsari mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes di Desa Tunggulsari dapat menggerakkan kegiatan ekonomi yang lebih baik.

Desa Tunggulsari merupakan sebuah Desa dimana mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, dimana kondisi kehidupannya masih mengedepankan adat pedesaan dengan taraf kehidupan ekonomi yang tergolong rendah. Desa Tunggulsari memiliki potensi yang baik dibidang peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, home industry namun dari kesemuanya masih berjalan secara individu dengan sistem manual hal ini dikarenakan masyarakat Desa yang pada umumnya masih belum bisa berjalan mengikuti perkembangan teknologi.

Melihat permasalahan Desa Tunggulsari diatas, pemerintah Desa Tunggulsari berusaha untuk membangun sistem sehingga semua kegiatan perekonomian masyarakat Desa Tunggulsari nantinya akan lebih terarah dan terencana sehingga tujuan daripada pemerintah Desa Tunggulsari akan tercapai maka didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang nantinya akan menjadi kendaraan perekonomian Desa Tunggulsari untuk dapat menjadi lebih baik.

BUMDes merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa dan menjadikan desa lebih mandiri. Keberadaan BUMDes Tunggul Sayekti di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung diharapkan mampu menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat untuk berkembang.

Namun hingga saat ini melihat dari beberapa sumber, sebagian besar BUMDes di Indonesia masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan. Dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia, minimnya relasi sehingga sulit dalam memasarkan produk dan lain-lain. tetapi disamping itu ada BUMDes yang pengelolaannya sudah baik. Perubahan-perubahan dalam pengelolaan dari BUMDes Tunggul Sayekti dapat dilihat dari pendapatan dari tahun ke tahun yaitu:¹¹

Tabel 1.1

Pendapatan BUMDes Tunggul Sayekti tahun 2018-2020

Tahun	Pendapatan
2018	Rp. 2.892.000
2019	Rp. 4.187.000
2020	Rp. 1.158.000

Sumber: Data BUMDes Tunggul Sayekti

Penting untuk desa menemukan potensi desa yang dapat menjadi unggulan bagi desa tersebut yang kemudian dikelola dan dikembangkan dan berpengaruh terhadap pendapatan asli desa dan perekonomian desa. Untuk itu peneliti ingin mengetahui Perkembangan dan Usaha Kreatif Yang Di Lakukan BUMDes Dalam Upaya Mengembangkan Usahanya. Karena jika dilihat BUMDes Tunggul Sayekti mengalami naik turun dalam beberapa tahun terakhir ini. Selain itu BUMDes Tunggul Sayekti tetap eksis ditengah pandemic meskipun perkembangannya melambat.

¹¹ Data BUMDes Tunggul Sayekti tahun 2020

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu:

“Analisis Perkembangan dan Usaha Kreatif Yang Di Lakukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Mengembangkan Usahanya (Studi Kasus BUMDes Tunggul Sayekti Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dinamika perkembangan BUMDes Tunggul Sayekti?
2. Usaha-usaha kreatif apa saja yang dilakukan oleh BUMDes Tunggul Sayekti dalam mengembangkan usahanya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dinamika perkembangan BUMDes Tunggul Sayekti.
2. Untuk mengetahui usaha-usaha kreatif yang dilakukan oleh BUMDes Tunggul Sayekti dalam mengembangkan usahanya.

D. Pembatasan Masalah

Berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian, dikemukakan beberapa Batasan masalah yang ditemukan oleh peneliti, yaitu :

1. Lembaga dalam hal ini adalah BUMDes Tunggul Sayekti periode tahun 2018-2020 dapat mengembangkan usahanya.
2. Berdasarkan teori yang ada, seharusnya BUMDes dapat mengembangkan usahanya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini semoga dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya perkembangan dan usaha kreatif yang di lakukan bumdes dalam upaya mengembangkan usahanya. Sehingga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi. Serta dapat dijadikan referensi penelitian topik-topik yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan akan dapat memperluas pengetahuan penulis tentang Perkembangan dan Usaha Kreatif Yang Di Lakukan BUMDes Dalam Upaya Mengembangkan Usahanya.

b. Bagi Institusi

Bagi BUMDes Tunggul Sayekti, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk kajian pertimbangan serta evaluasi dalam menentukan kebijakan dalam waktu yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat perkembangan dan usaha kreatif yang di lakukan bumdes dalam upaya mengembangkan usahanya.

F. Definisi istilah

1. Konseptual

a. Bumdes

Bumdes merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa. Dimana bentuk badan usaha ini seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari hasil kekayaan dan potensi desa. Lembaga ini diprediksi menjadi kekuatan besar yang akan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berbagai keragaman potensi yang dimiliki desa (Undang-undang No. tahun 2014). BUMDes didirikan harus berdasarkan kehendak seluruh warga dan masyarakat yang diputuskan melalui Musyawarah Desa, forum ini yang dapat melahirkan berbagai keputusan utama berupa kebijakan mulai dari nama Lembaga, pemilihan kader dan pengurus hingga jenis usaha yang akan dijalankan.¹²

b. Desa

¹² Abdul Rahman dkk, "BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa", (Yayasan kita menulis, 2020), hal 4

Desa menurut PPNo 72/2005 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa menjadi tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama agar dapat mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka.

Menurut perkembangannya Desa dibagi menjadi tiga yaitu desa swadaya, desa swakarsa dan desa swasembada. Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi akan tetapi tidak dikelola dengan baik dengan ciri-ciri : daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antar manusia sangat erat, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Sedangkan desa swakarsa adalah peralihan transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada ciri-cirinya adalah : kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi, desa swakarsa sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian, telah memiliki tingkat perekonomian, Pendidikan, jalur lalu lintas-prasarana lain dan jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar. Dan Desa swasembada adalah desa yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya alam dan potensinya

ciri-cirinya yaitu : kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan, tingkat kepadatan penduduk tergolong tinggi, tidak terikat dengan adat istiadat, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain, partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.¹³

2. Operasional

Untuk mewujudkan ekonomi yang baik, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pembangunan dari unit yang terkecil yaitu Desa. Dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui suatu Lembaga yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana dengan kehadiran BUMDes diharapkan mampu mewujudkan perekonomian Desa yang mandiri dan meningkatkan pendapatan asli desa.

G. Sistematika Penulisan

Dalam bab yang akan dibahas dalam sistematika penulisan adalah berisi mengenai konsep penelitian skripsi. Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan proposal skripsi ini maka perlu disusunnya sistematika penelitian. Sesuai dengan topik yang peneliti angkat, maka disusunlah beberapa sub bab seperti dibawah ini:

1. BAB 1 PENDAHULUAN

¹³ Frisdiantara Christea & Imam Mukhlis ,*Ekonomi Pembangunan*”, (Malang : Universitas Kanjuruhan Malang, 2016),Hal 24

Dalam bab ini, terdapat beberapa bahasan yaitu : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, landasan teori. Diadakannya pendahuluan bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi pembaca.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini II, menguraikan terkait kajian Teori, landasan teori yang dijadikan Analisa dalam membahas obyek-obyek penelitian mengenai **Analisis Perkembangan dan Usaha Kreatif Yang Di Lakukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Mengembangkan Usahanya (Studi Kasus BUMDes Tunggul Sayekti Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)**. Selain itu, dalam bab ini juga membahas penelitian terdahulu sebagai pembanding penelitian yang sedang dilakukan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait Rancangan Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, teknik analisis data, sumber data, obyek dari penelitian, subyek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode penelitian yang digunakan.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang membahas tentang diskripsi objek penelitian yang ditemukan dan temuan penelitian.

5. BAB V HASIL PEMBAHASAN

Dalam bab V ini, peneliti menjabarkan hasil pembahasan dengan membandingkan dengan teori yang telah dilakukan peneliti lainnya.

6. BAB VI PENUTUP

Penulis memaparkan bagian penutup yang isinya memuat kesimpulan yang diambil dan saran.